

Receive : 27 Mei 2024
Revised : 30 Mei 2024
Accepted : 02 June 2024

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v6i1.82

Vol. 6 No. 1, Juni 2024, Hlm. 29-46



Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Bone Pololoba Desa Lopito Di Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

***Samkamaria¹, Alifa Raema widana¹, Cepi Triana Safari²**

E-Mail : [*samkamaria.pk25@gmail.com](mailto:samkamaria.pk25@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu¹
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Tasikmalaya²

ABSTRACT

Banggai Islands Regency is one of the districts in Central Sulawesi which has very beautiful natural tourist destinations. Based on data from 2020-2023, the Banggai Islands Tourism Office has a total of 82 natural tourist destinations, and 12 artificial tourist destinations. One of the natural tourist destinations that is currently viral among the people of Banggai Islands Regency is the Bone Pololoba beach tourist attraction located in Lopito Village. Currently, Bone Pololoba beach tourism is one of the leading tourist destinations in Banggai Islands Regency, especially among instagramable people. Bone Pololoba beach tourism is geographically located in Lopito Village, Totikum District. The panorama and beauty of Bone Pololoba beach which is still very natural attracts the attention of both local and foreign tourists to come to visit the Bone Pololoba panatai tourism site. Based on the results of the research, the implementation of the development of Bone Pololoba beach tourism objects carried out by the Tourism Office has not been carried out effectively. To find out why the implementation of the Bone Pololoba Beach tourism development policy at the Banggai Islands Tourism Office has not been effective, the author uses the Donald Van Metter and Carl Van Horn theoretical approach, to look at aspects (standards, measures of goals and policies, resources, characteristics of implementing agents, attitudes / tendencies, communication between implementing organizations and implementing activities, and the economic, social and political environment). Data collection methods were conducted through observation, direct interviews and documentation. Informant selection technique using purposive technique. From the results of the implementation of the Bone Pololoba Beach tourism object policy, it has not been effective. This is because there are still shortcomings in several aspects. Among them are the resources referred to in this case are limited human resources, and both financial and other supporting infrastructure.

Keywords: *Policy Implementation, Tourism Development, Bone Pololoba Beach, Banggai Islands.*

LATAR BELAKANG

Kebijakan pengembangan wisata perlu dilakukan mengingat Indonesia yang kaya akan alam, budaya dan kreativitas masyarakatnya harus dikembangkan agar menjadikan daerah tersebut sebagai destinasi wisata yang berkualitas. Kebijakan pengembangan obyek wisata tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yakni Pembangunan pariwisata berkelanjutan, prinsip-prinsip penyelenggaraan, dan memberdayakan masyarakat setempat. Regulasi ini juga diterapkan pada pengembangan wisata pada sektor kelautan. Kebijakan tersebut lebih diperkuat dan disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan dan potensi daerah (Rahman et al., 2021).

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 menjadi landasan yang memberikan kewenangan pada daerah untuk mengembangkan seluruh kekayaannya (Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2015). Pendapatan dari otonomi pariwisata ini nantinya akan dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi tanpa harus semua tergantung pada pemerintah pusat (Soebagyo, 2018). Pendapatan dari pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu memberdayakan ekonomi Masyarakat setempat dan juga menjadi penambah pendapatan asli

daerah. Dengan adanya otonomi pengembangan pariwisata daerah ini, pemerintah daerah mempunyai tugas dan tuntutan untuk mengembangkan semua sumber daya alamnya. Bukan hanya itu saja, dengan pengembangan sumber daya alam diharapkan juga pemerintah daerah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan harapan agar masyarakat didaerah menjadi masyarakat yang mandiri (Sayekti, 2019) Dalam Faizal et al., 2023.

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki destinasi wisata alam yang sangat indah. Terdapat kekayaan alam yang sangat indah untuk dikunjungi wisatawan. berdasarkan data tahun 2020-2023 Dinas Pariwisata Banggai Kepulauan total jumlah Destinasi wisata alam berjumlah 82, dan destinasi wisata buatan 12. Salah satu destinasi wisata alam yang saat ini sedang viral dikalangan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah obyek wisata pantai Bone Pololoba yang terletak di Desa Lopito. Saat ini wisata pantai Bone Pololoba menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan terutama dikalangan instagramable. Pariwisata pantai Bone Pololoba secara geografis terletak di Desa Lopito Kecamatan Totikum. Panorama dan keindahan pantai Bone Pololoba yang masih sangat alami sangat menarik perhatian

witasatwan baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara untuk datang berkunjung ketempat pariwisata panatai Bone Pololoba.

Oleh karena itu, untuk dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara datang berkunjung ke tempat wisata pantai Bone Pololoba dibutuhkan kebijakan pengembanga dan pengelolaan kawasan wisata pantai Bone Pololoba. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata pantai Bone Pololoba menjadi salah satu penentu banyak tidaknya wisatawan yang akan datang berkunjung. Pengembangan serta manajemen yang baik berdampak pada keadaan wisata saat ini dan kedepannya. Destinasi wisata Bone Pololoba dapat menjadi sumber pemasukan desa serta memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat desa Lopito. Disisilain wisata pantai Bone Pololoba dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar Desa Lopito serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan adanya kebijakan pengembangan daya tarik wisata pantai Bone Pololoba oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan diharapkan obyek wisata pantai Bone Pololoba mampu bersaing dengan wisata-wisata diberbagai daerah di Indonesia dan dibelahan dunia.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai

Kepulauan merupakan upaya untuk menarik wisatan datang berkunjung keobyek wisata yang ada di Banggai Kepulauan khususnya pantai Bone Pololoba. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No 390 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2021-2025. dimana dijelaskan bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terkoordinasi berbagai Kementerian Lembaga sampai dengan organisasi perangkat daerah terkait dengan para pengambil kebijakan di Daerah. Dan lebih lanjut Desa Lopito di tetapkan sebagai desa wisata sebagaimana tertuang dalam kebijakan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No 131 Tahun 2022 tentang penetapan desa wisata kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022. Kebijakan ini menimbang bahwa penyelenggaraan pariwisata diarahrak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat dengan tetap melestarikan keanekaragaman hayati dan terpeliharanya nilai-nilai agama, social, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dari hasi penelitian dilapangan penulis menemukan beberapa kendala implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Pantai Bone Pololoba ternyata dari enam aspek yang dimaksud oleh

Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Agustino, 2006) yakni enam aspek standar, ukuran tujuan dan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan, komunikasi antar organisasi pelaksana dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Aspek Sumberdaya masih kurang mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dimana masalah pendidikan, keterampilan dan jumlah tenaga kerja yang mengelola obyek wisata tidak sebanding dengan banyaknya obyek wisata yang tersebar di Kabupaten Banggai Kepulauan. Jika dilihat dari kuantitas jumlah pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan jumlahnya sangat terbatas. sementara itu, Masyarakat setempat belum ada yang diberikan pelatihan secara khusus untuk mengelola pariwisata secara optimal. Hal ini lah yang kemudian menjadi faktor penyebab sejak berdirinya dan beroperasinya pantai Bone Pololoba sampai saat ini tahun 2024, pelaksanaan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kabupaten Banggai Kepulauan belum ada perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari kondisi Pantai Bone Pololoba yang saat ini kurang terurus, dan tidak tersedianya warung makan dilokasi pantai, gazebo untuk bersantai mulai terbengkaia, serta masih ada sampah yang terlihat berserakan di dalam Kawasan pantai Bone Pololoba,

dan fasilitas WC dan ruang ganti yang masih terbatas.

Selain berkaitan dengan sarana prasarana yang telah disebutkan diatas, yang menjadi permasalahan utama dalam pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba belum efektif adalah berkaitan dengan sumber daya yang masih belum terpenuhi. Diantara sumberdaya tersebut adalah kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga Pembangunan sarana prasarana dilakukan secara berkala. Selain itu minimnya sumber daya manusia baik di dalam internal dinas pariwisata kabupaten Banggai Kepulauan dan SDM Masyarakat desa Lopito yang mengelola pariwisata Pantai Bone Pololoba.

Pariwisata Pantai Bone Pololoba memiliki sejumlah potensi yang besar dalam sektor Pariwisata, serta menjanjikan untuk peningkatan perekonomian dibidang pariwisata. Keindahan pasir putih Pantai Bone Pololoba membawa kedamaian dan keindahan alam kedalam pikiran dan perasaan setiap pengunjung, serta bebatuan dan lautan biru memberikan dan pemandangan sunset memberi kesan dan cerita romantic bagi pengunjung. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang selalu meningkat terutama dihari-hari libur.

Dalam hal pengembangan daya tarik pariwisata pantai Bone Pololoba Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

Kepulauan perlu melibatkan pihak-pihak terkait diantaranya masyarakat setempat ataupun pengelola objek wisata agar pantai Bone Pololoba dapat terkelolah dengan optimal. Hal demikian dibutuhkan untuk menunjang pembangunan atau pengembangan daya tarik wisata pantai Bone Pololoba. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas wisata serta kualitas pelayanan guna meningkatkan mutu dan kualitas sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis tuangkan dalam latar belakang diatas yakni pelaksanaan pengembangan obyek wisata pantai Bone Pololoba yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, belum terlaksana secara efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan, pengumpulan data yang spesifik dari informan, dan menganalisis data secara deduktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2007: 20) menerangkan bahwa metode kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain:

penelitian partisipatoris, analisis wacana, *etnografi*, *grounded theory*, *studi kasus*, *fenomenologi*, dan naratif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif sebagai bagian dari penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Aspek Standar dan Sasaran Kebijakan Implementasi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Bone Pololoba Di Dinas Pariwisata Banggai Kepulauan

Suatu kebijakan yang dinilai ideal, jelas arahnya serta terukur dan realistis diharapkan dapat memudahkan dan mengatasi berbagai kesulitan yang kemungkinan menjadi penghambat dalam pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Namun, kebijakan dan tujuan yang ukurannya dianggap berlebihan dapat menyebabkan eksekusi dalam proses pelaksanaannya.

Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Winarno, 2012:159) menyatakan jika identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahapan yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Dimana indikator kinerja ini melihat sejauhmana ukuran dan tujuan dari suatu kebijakan sudah dilaksanakan. Kemudian bahwa ukuran dan tujuan tersebut merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur.

Pada pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba, ukuran dan tujuan

kebijakan ini pada dasarnya memberikan akses pelayanan dan pemeliharaan pasca pelayanan kepada akseptor melalui jaminan pembiayaan pasca pelayanan. Kemudian, dikarenakan ukuran dan tujuan dari kebijakan itu sendiri adalah dasar indikator maka hal inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pada seluruh tahapan pelaksanaannya, dengan melihat sejauhmana indikator-indikator ini telah dilaksanakan dan dicapai.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata, hal-hal yang diidentifikasi oleh penulis yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, dimana selain tujuan kebijakan itu sendiri, melingkupi: kesesuaian dari program dengan kultur social lembaga implementor, kepastian alur dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan, serta sasaran, pedoman pelaksanaan kegiatan yang ideal untuk dilaksanakan.

Untuk mengkaji hal-hal yang mencakup seperti yang dikemukakan ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dalam menghimpun data dan informasi berdasarkan keterangan-keterangan yang dikemukakan, bahwa implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata secara keseluruhan sudah sesuai dengan keadaan lembaga implementor, dengan melihat tujuan dari program itu sendiri. Seperti yang

disampaikan oleh kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai Kepulauan dalam wawancara sebagai berikut:

“Objek Wisata Pantai Bone Pololoba merupakan salah satu daya Tarik wisata utama yang ada di kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk itu dinas pariwisata sangat berfokus pada pengembangan objek wisata tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari APBD yang ada di dinas pariwisata tiap tahunnya selalu terdapat anggaran pengembangan objek wisata, Sejauh ini Dinas Pariwisata terus berupaya dalam pengembangan pariwisata kabupaten Banggai Kepulauan khususnya Kawasan Objek Wisata Pantai Bone Pololoba. Dalam hal ini dinas pariwisata berfokus pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas penunjang agar wisatawan merasa nyaman sehingga kunjungan wisatawan semakin meningkat.”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa standar tujuan kebijakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba sudah sesuai dengan dengan fasilitas sarana prasarana yang baik akan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung hal tersebut sesuai dengan sosial-kultur Masyarakat.

Adapun yang dimaksud adalah daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk didalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan; dan fasilitas yang dimiliki seperti akomodasi, usaha makanan dan minum, parkir, transportasi, rekreasi dan lain-lain. Tujuan dan sasaran dalam kebijakan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya di Pantai Bone Pololoba

tertuang dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No 131 Tahun 2022 memutuskan, menetapkan Kedua: desa wisata dikabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas yaitu; tujuan (1) untuk membangun kualitas lingkungan Masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan potensi wisata yang terdapat dimasing-masing desa wisata (2) terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya Masyarakat di desa; dan (3) mengoptimalkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata alam dan wisata tirta dalam rangka peningkatan dan perkembangan ekonomi kerakyatan.

Pengembangan obyek wisata dikabupaten Banggai Kepulauan khususnya di Pantai Bone pololoba sudah sesuai dengan standar tujuan kebijakan. Namun, meskipun secara kebijakan sudah sesuai akan tetapi masih tetap saja tidak sempurna yang kita bayangkan, hal tersebut dikarenakan masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah terutama jika kita berbicara terkait dengan budaya Masyarakat.

Implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba sudah dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan tujuan lembaga implementor, alur prosedur serta petunjuk pelaksana program sudah

sangat jelas dan tepat sesuai dengan regulasi kebijakan.

2. Aspek Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Bone Pololoba Di Dinas Pariwisata Banggai Kepulauan.

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Winarno, 2012;170) menjelaskan hubungan antara variabel sumber daya dengan variabel yang lain, dijelaskan jika jenis dan tingkatan sumber daya yang disiapkan oleh keputusan kebijakan akan berpengaruh pada komunikasi dan pelaksanaan. Dan apabila sumberdaya yang lain dianggap tersedia, hal ini dapat menyebabkan pelaksana melihat kebijakan dengan positif sehingga dapat menimbulkan ketaatan dari para pelaksana kebijakan.

Dalam pelaksanaan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba, penting mendapat dukungan sumberdaya yang cukup. Dan, jika memperhatikan cakupan kegiatan dan apa yang menjadi sasaran dari kebijakan ini, mulai dari pelayanan secara langsung baik itu pelayanan pada kantor pariwisata atau pelayanan kegiatan yang bersifat administratif lain yang diberikan kepada masyarakat atau pengunjung wisata dilaksanakan pada fasilitas sarana prasarana yang ada, sehingga sumberdaya yang dianggap perlu untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang berupa sumberdaya

finansial, waktu, personil, serta sarana prasarana pelayanan.

Ketersediaan sumberdaya pada pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan di setiap tingkatan pelayanan memiliki keperluan yang tidak sama. Mulai dari ketersediaan personil, keuangan, sarana prasarana serta waktu pelayanan. Namun harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan dari setiap pelaksana. Pelayanan dalam bentuk promosi dapat dilakukan dengan cara; komunikasi, informasi dan edukasi, demikian pula pelayanan untuk menentukan sikap kepada Masyarakat atau pun pengunjung wisata oleh tenaga/petugas wisata dengan fasilitas berupa seperti tempat sampah dan juga gasibu atau pun toilet umum dan ruang ganti.

Beberapa fakta yang ditemukan pada lokasi penelitian menemukan fakta bahwa, beberapa jenis sumber daya masih tersedia dengan tidak memadai dan terbatas, sehingga memengaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada pengunjung wisata Pantai Bone Pololoba. Seperti yang disampaikan oleh informan yakni kepala bidang destinasi pariwisata kab. Banggai Kepulauan menyatakan pendapat bahwa sebenarnya jika diukur dari sumberdaya masih belum memenuhi, masi perlu koordinasi dan juga konsultasi ditataran implementor itu

sendiri yakni dinas pariwisata. Untuk lebih jelas dapat disimak dalam wawancara berikut ini:

“untuk pengembangan obyek wisata Bone Pololoba Masih perlu untuk sering berkoordinasi dengan konsultan pariwisata, hal ini dikarenakan SDM yang tersedia belum mencukupi, karena SDM Bidang pariwisata dan teknis masih sangat kurang untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan pengembangan obyek wisata seperti yang dimaksud. Jika dilihat dari segi financial belum terlalu optimal karena pengembangannya dilakukan secara bertahap walaupun ada anggaran dari dinas pariwisata maupun Dana Desa”.

Dari pernyataan tersebut diatas sangat jelas menyatakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba diukur dari dimensi sumber daya masih belum efektif, karena secara sumber daya manusianya yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan belum mencukupi, selain itu secara teknis juga masih sangat kurang sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan konsultan yang paham terkait pengembangan pariwisata, disisilain dalam mengimplementasikan kebijakan perlu dukungan financial yang cukup sebagai factor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan, namun pada kenyataannya meskipun sumber anggaran pengembangan pariwisata Pantai Bone Pololoba mendapatkan anggaran dari dinas pariwisata dan juga dana desa namun hal tersebut belum mencukupi untuk pengembangan obyek

wisata Pantai Bone Pololoba. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penghambat belum efektifnya implementasi pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba diukur dari dimensi sumberdaya belum efektif, hal tersebut dikarenakan ada beberapa factor yang menjadi penyebab pengembangan obyek wisata menjadi belum efektif diantaranya adalah sumberdaya manusia perlu ditingkatkan lagi, yang kedua anggaran terkait dengan pengembangan pariwisata Pantai Bone Pololoba perlu ditingkatkan sehingga Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat terealisasi dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan pengunjung dan juga kenyamanan pengunjung. Sebagaimana yang tertera dalam regulasi kebijakan tentang Pariwisata kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Aspek Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Bone Pololoba Di Dinas Pariwisata Banggai Kepulauan

Apa yang dimaksud variabel Karakteristik agen pelaksana pada pelaksanaan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yaitu berhubungan dengan indikator yang tepat serta cocok dengan para agen

pelaksananya Agustino (2006;162). Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012;166) dijelaskan bahwa pola pemerintahan yang bisa memahami karakter, nilai dan bentuk hubungan yang terus menerus terjadi pada badan-badan eksekutif yang memiliki potensi secara nyata serta hal-hal yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan. Lagi pula, seperti apa dan bagaimana hubungan antara kelompok pelaksana dengan personil yang turut serta pada kegiatan pelaksanaan kebijakan.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Agustino, 2006;160) menjelaskan bahwa walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada, karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Menurutny juga bahwa dengan tersedianya *standard operating prosedures* (SOPs) dan fragmentasi atau pendistribusian tanggung jawab atau aktivitas- aktivitas pegawai antara beberapa unit kerja akan lebih mengefektifkan kinerja struktur birokrasi. Struktur organisasi menurut Gibson (dalam Pasolong, 2011;78) adalah pola formal dalam mengelompokan orang dan pekerjaan. Struktur organisasi

berpengaruh terhadap perilaku individu dan kelompok yang mencakup suatu organisasi. Dalam menjabarkan kelebihan pendekatan bagan organisasi dalam administrasi publik, Mindarti (2007;20) menjelaskan bahwa pendekatan bagan atau struktur organisasi berdasarkan pada keyakinan bahwa karakteristik dan hubungan-hubungan pokok dalam struktur organisasi dapat digambarkan.

Uraian diatas memberikan penjelasan, bahwa struktur dari suatu organisasi memberikan gambaran karakteristik organisasi, dan memberi kejelasan mengenai mekanisme atau alur dan prosedur yang mesti dilaksanakan setiap unsur individu yang terlibat dalam struktur organisasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan berdasar pada profesional dan kompetensi yang dimiliki. Namun bila penggambaran karakteristik, alur prosedur, nilai-nilai dan hubungan pokok tidak bisa menjelaskan tujuan dan sasaran kebijakan secara tepat, maka dalam pelaksanaan kegiatannya untuk mencapai tujuan akan mengalami hambatan.

Pelaksanaan kegiatan pada kebijakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba di Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada paragraf diatas, pengelolaan pengembangan obyek wisata Pantai

Bone Pololoba dilakukan oleh bagian bidang destinasi Pariwisata dan bidang Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, sebagaimana yang tertuang dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata, Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam struktur organisasi menjelaskan fungsi dari bagian-bagian ini dalam melaksanakan kebijakan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk mengkaji bagaimana bagian-bagian dalam struktur ini apakah dapat bekerja secara maksimal, serta personal yang ditempatkan pada bagian-bagian ini memiliki kompetensi dan sesuai dengan fungsi bagian tersebut, dapat disimak dalam kutipan wawancara berikut bersama informan:

“secara struktur dalam organisasi sudah sesuai dengan fungsi dan tupoksi masing-masing, terkait dengan program apa pun itu disesuaikan dengan tujuan dari kebijakan dan juga komitmen Lembaga. Salah satu komitmen pejabat dengan menjadikan objek wisata Pantai Bone Pololoba sebagai salah satu daya tarik wisata yang di fokuskan untuk dikembangkan sehingga menjadi objek wisata unggulan. Serta nantinya di targetkan pariwisata masuk ke dalam salah satu penyumbang PAD di kabupaten Banggai Kepulauan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun infrastruktur serta fasilitas memadai serta memberikan pelatihan

kepada masyarakat sekitar tentang pengelolaan objek wisata. Selain itu, Dinas pariwisata telah melakukan promosi melalui media elektronik salah satunya melalui media sosial dinas pariwisata sendiri. Namun tidak hanya objek wisata Pantai Bone Pololoba tetapi seluruh objek wisata yang ada di kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam kesempatan lain juga dinas pariwisata melakukan promosi dengan mengikuti berbagai pameran baik itu skala provinsi maupun nasional."

Jika dilihat pernyataan wawancara diatas maka dapat ditarik semua kesimpulan bahwa secara struktur organisasi atau karaktersistik agen pelaksana sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, jika dilihat dari prosedur maupun nilai-nilai dalam implementasi pengembangan pariwisata Pantai Bone Pololoba sudah sesuai dengan kebijakan jika diukur berdasarkan dengan dimensi karakteristik agen pelaksana sebagaimana yang dimaksudkan Donald Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012;166) bahwa struktur dari suatu organisasi memberikan gambaran karakteristik organisasi, dan memberi kejelasan mengenai mekanisme atau alur dan prosedur yang mesti dilaksanakan setiap unsur individu yang terlibat dalam struktur organisasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan berdasar pada profesional dan kompetensi yang dimiliki.

4. Aspek Sikap/Kecenderungan (Disposition) Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Bone Pololoba Di Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

Kajian variabel-variabel atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kebijakan publik, para pakar melakukan identifikasi yaitu *disposition* atau kecenderungan pelaksana kebijakan ikut berkontribusi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan public berhasil atau tidak. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012;168) mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni pemahaman tentang kebijakan, penerimaan, netralitas atau penolakan terhadap kebijakan, dan intensitas tanggapan itu. Pemahaman para pelaksana dalam hal ini menyangkut tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan- tujuan kebijakan. Sehingga dengan demikian akan menentukan sikap terhadap kebijakan ini untuk diterima dan dilaksanakan atau sebaliknya sangat bergantung dari persepsi individu-individu. Alasan menerima atau menolak tujuan-tujuan kebijakan oleh para pelaksananya menurut Van Meter dan Van Horn juga dikarenakan tujuan kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya punya

potensi akan bertentangan dengan sistim nilai pribadi dari personil, keinginan mengenai suatu kebutuhan, atau karena hubungan-hubungan yang tercipta dan yang lebih disukai.

Sejalan dengan pendapat Van meter dan Van Horn, Edward III (dalam Winarno, 2012:196) juga memberikan pandangan bahwa dampak dari kecenderungan para pelaksana terhadap efektifnya suatu kebijakan bila kebijakan tersebut mendapat dukungan para pelaksananya. Namun ketika kebijakan-kebijakan itu bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi, maka tidak akan efektif.

Kajian terhadap variabel *disposition* ini dengan melakukan wawancara terhadap informan, yang merupakan para pelaksana pengembangan obyek wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengemukakan fakta bahwa, hampir keseluruhan informan menjelaskan mendukung dan menerima sepenuhnya serta menjalankan kebijakan pengembangan obyek wisata di kabupaten Banggai Kepulauan khususnya wisata Pantai Bone Pololoba, mengingat tujuan-tujuan kebijakan yang sangat berpihak terhadap kepentingan masyarakat. Terungkap juga bahwa keterlibatan Masyarakat desa Lopito ini cukup berkontribusi dalam mengembangkan obyek wisata Pantai

Bone Pololoba, hal tersebut terlihat dari Sebagian anak muda desa Lopito ikut terlibat langsung dalam juga mempromosikan obyek wisata tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga mengalokasikan dana desa untuk mendorong pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba bersama-sama dengan Dinas Pariwisata kab. Banggai Kepulauan. Berikut ini adalah pernyataan dari informan:

"Dengan adanya kebijakan terkait pengembangan Obyek wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya obyek wisata Pantai Bone Pololoba Desa Lopito semua pelaksana kebijakan sudah memahami dalam pelaksanaannya, namun ditatan Masyarakat khususnya masyarakat desa Lopito belum Optimal. Masyarakat masih perlu untuk terus di dorong dalam berkolaborasi maupun berkreatif secara mandiri dalam pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba. Guna melaksanakan setiap kebijakan yang ada secara satu persatu"

Dari pernyataan diatas memberikan gambaran fakta bahwa secara personal maupun Lembaga pelaksana memahami betul netralitas dalam melaksanakan bijakan, serta semua implementor ikut berkontribusi dalam pengembangan obyek wisata yang ada di kabupaten Banggai Kepulauan khususnya wisata Pantai Bone Pololoba. Namun berkaitan dengan

personal Masyarakat desa Lopito masih perlu Upaya-upaya lebih untuk mendorong Masyarakat agar terlibat aktif dan ikut berkontribusi secara aktif dalam pengembangan pariwisata Pantai Bone Pololoba. Mengingat salah satu tujuan pengembang wisata Pantai Bone Pololoba untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat, sehingga keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba bisa terimplementasikan secara utuh sesuai dengan tujuan kebijakan. Secara garis besar kecenderungan pelaksana kebijakan dalam berkontribusi terhadap pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik meskipun belum optimal karena kerelibatan Masyarakat desa Lopito belum berperan aktif.

5. Aspek Komunikasi dan Aktivitas Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Bone Pololoba Di Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

Pada dasarnya komunikasi merupakan interaksi antara individu atau kelompok untuk memberikan penyampaian terhadap maksud dan tujuan, para pihak yang terlibat dalam kegiatan berkomunikasi itu dapat mengetahui hal apa saja yang dikomunikasikan baik itu melalui media-media ataupun dikomunikasikan secara langsung. Dalam hal berkomunikasi, tentunya para pihak

memakai teknik tertentu maupun memakai media-media yang diharapkan bisa memfasilitasi dalam proses komunikasi.

Carl I Hovland (dalam Suhandang, 2009;14) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana seseorang insan (komunikator menyampaikan rangsangan biasanya berupa lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah perilaku insan lainnya (hadirin). Hovland juga mengidentifikasi empat faktor yang terlibat dalam proses komunikasi, yaitu:

- a. Komunikator, yang memprakarsai komunikasinya,
- b. Rangsangan, atau stimulus atau lazim pula disebut pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator,
- c. Hadirin, biasa disebut komunikan yang menggapai pesan komunikasi tersebut,
- d. Tanggapan hadirin terhadap pesan komunikasi yang disampaikan komunikator itu.

Dalam konteks implementasi kebijakan Van meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012;162) mengatakan sesungguhnya prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam

mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Agustino (2006;162) menginterpretasikan variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan mengatakan bahwa komunikasi dalam bentuk koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam proses implementasi kebijakan publik. Sehingga, semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan semakin kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba, melakukan komunikasi seperti berkoordinasi bisa dilakukan setiap hari, serta media yang digunakan berupa kegiatan pertemuan yang rutin dilakukan, yaitu 2 (dua) kali dalam setahun. Disamping itu pertemuan yang bersifat monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan. Seperti yang dijelaskan oleh informan yakni kepala dinas Pariwisata kab. Banggai Kepulauan dalam kutipan wawancara berikut ini:

"Dinas pariwisata melakukan koordinasi kepada Pejabat terkait agar diberikan anggaran untuk pengembangan pariwisata di kabupaten Banggai Kepulauan. Serta pada saat rapat perencanaan anggaran dinas pariwisata selalu menyampaikan terkait hal-hal

dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Pariwisata secara berkala melakukan koordinasi serta rapat kepada pemerintah desa dalam rangka rencana pengembangan objek wisata yang ada di desa. Komunikasi yang dibangun sudah terjalin cukup baik. Melalui kegiatan Pendataan Objek Wisata dan Usaha Pariwisata yang dilaksanakan oleh bidang destinasi pariwisata menjadi wadah aspirasi komunikasi masyarakat kepada pihak dinas pariwisata. Masyarakat dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dalam mengembangkan objek wisata Pantai Bone Pololoba."

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh informan lainnya yakni kepala bidang destinasi wisata Dinas Pariwisata Kab. Banggai Kepulauan, Adapun pernyataan tersebut tertuang dalam kutipan wawancara berikut ini:

"Menurut saya komunikasi yang dibangun selama ini sudah cukup baik, ditataran dinas pariwisata maupun dengan pemerintah desa saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Anatar dinas pariwisata dengan pemerintah desa Lopito sudah berkoordinasi dan saling bertukar pikiran dan selalu terbuka menerima masukan dari Masyarakat terkait dengan

pengembangan obyek wisata di Banggai Kepulauan khususnya di Pantai Bone Pololoba".

Dari uraian penjelasan informan diatas menyatakan sejauh ini komunikasi yang dibangun sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan. Setiap pihak yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba saling berkoordinasi dan membangun komunikasi baik ditataran dinas pariwisata maupun perangkat desa Lopito dan juga Masyarakat Lopito.

6. Aspek Keandalan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Bone Pololoba Di Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

Variabel terakhir yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn ini, yaitu keberhasilan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan bergantung pada bagaimana lingkungan eksternal yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan kegiatan. Dipahami pula, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang bagus bisa menjadi pemicu dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Sehingga usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan perlu mendapat dukungan kondisi lingkungan eksternal yang cukup baik

dan kondusif (dalam Agustino, 2006;162).

Kebijakan yang memiliki tujuan utama memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat yang juga menjadi permasalahan utama bagi mereka, menurut Van Horn (dalam Jones, 1994;344) turut mempengaruhi hubungan sosial dimana masyarakat akan lebih bersemangat dan tidak menolak suatu kebijakan sehingga bisa terlaksana. Apabila mengacu pada tujuan yang menjadi dasar dilaksanakannya kebijakan pengembangan obyek wisata, ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan lebih berpihak pada masyarakat khususnya Masyarakat dilingkungan lokasi pariwisata. Dan juga, pelaksanaan di lingkungan masyarakat setempat dan juga pengunjung sebagai kelompok sasaran dapat berjalan dengan baik. Dan kemungkinan untuk diterima masyarakat setempat dengan baik pastinya punya kaitan erat dengan proses komunikasi dan koordinasi Bersama perangkat desa dan juga Masyarakat. kebijakan masih belum sejalan dengan tujuan dan sasaran, bisa menimbulkan potensi terjadi konflik dan berdampak pada penolakan-penolakan yang sifatnya politis. Masyarakat yang setuju pada pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba bukan serta-merta disebabkan oleh tujuan yang

memperlihatkan dukungan terhadap mereka, namun juga dibutuhkan sikap yang konsisten untuk pelaksana suatu kegiatan kebijakan sesuai dengan tujuan awal, sehingga tidak menemukan masalah yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Untuk lebih memahami kondisi lingkungan ekonomi, social, dan politik terkait dengan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba, maka perlu disimak kutipan wawancara dibawah ini Bersama informan yang merupakan kepala dinas pariwisata kabupaten Banggai Kepulauan.

“Sejauh ini penerimaan Masyarakat terkait dengan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba, saya rasa Masyarakat cukup puas melihat perkembangan Pembangunan yang ada di objek wisata Pantai Bone Pololoba, serta mereka merespon positif dengan apa yang telah dilaksanakan oleh dinas pariwisata kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Pembangunan obyek wisata ini dapat membantu masyarakat meningkatkan peningkatan ekonomi. Kami yakin kedepan pariwisata dapat menjadi salah satu penyumbang PAD serta berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat kabupaten Banggai Kepulauan terkhusus masyarakat yang ada di Desa Lopito. Sementa itu, terkait dengan lingkungan politik, saya pikir Peran politik sedikit

memberikan dampak dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Ungea dalam hal anggaran. Anggaran yang di maksud yaitu hasil Pokok Pikiran (POKIR) Anggota Dewan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dari aspirasi masyarakat. Tidak sedikit anggaran untuk pengembangan objek wisata Pantai Bone Pololoba berasal dari pokir tersebut”.

Penrimaan Masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba dapat dilihat dari respon positif masyarakat dilingkungan obyek wisata, dengan adanya respon positif dari Masyarakat hal ini dapat membantu untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba ditinjau dari aspek lingkungan ekonomi, social, dan politik sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian anatara pelaksana dan juga Masyarakat yang setuju dengan kebijakan terkait pengembangan obyek wisata di Pantai Bone Pololoba.

KESIMPULAN

Dilihat dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:168) (standar, ukuran tujuan dan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan, komunikasi antar organisasi pelaksana

dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, social, dan politik) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata pantai Bone Pololoba masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan di beberapa aspek. Diantaranya adalah Sumber Daya yang dimaksud dalam hal ini adalah Sumber daya manusia yang masih terbatas, dan kedua financial dan sarana prasarana pendukung lainnya dalam proses implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Pantai Bone Pololoba di Dinas Pariwisata kabupaten Banggai Kepulauan. Sebagaimana diketahui dalam dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012;168) merupakan sebuah sistem yang tidak terpisahkan, maka apabila diantara sistem tersebut masih ada yang tidak terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Penerbit Sage Publication, Inc.
- [2]. Edwards, George C III dan Sharhansky. (1980). *The Politics of Policy Implementation*. New York: Penerbit St. Martin's Press
- [3]. <https://data.banggaikab.go.id/data-set/detail/data-sektoral-dinas-pariwisata-tahun-2021>
- [4]. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No 131 Tahun 2022 tentang penetapan desa wisata kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022.
- [5]. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No 390 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2021- 2025
- [6]. Serly Wulandari, Firmansyah Nur Abdul Ghonni, (2021). *"Efektivitas Pengelolaan Aplikasi Tulungagung Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur"* Vol-3 Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan. Ejournal.idpn.ac.id/jtkp.
- [7]. Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- [8]. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [9]. Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- [10]. Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke*

Receive : 27 Mei 2024

Revised : 30 Mei 2024

Accepted : 02 June 2024

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v6i1.82

Implementasi Kebijakan Negara.

Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

- [11]. Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, Edisi II.